ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELECEHAN ANAK PEREMPUAN

Septiyan Dwi Putra¹, Muhammad Azrul Amirullah²
riyn.septiyan88@gmail.com¹, amirullahazrul15@gmail.com²
Universitas Bengkulu¹, Universitas Darussalam Gontor²

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Salah satu ciri Negara hukum, semua yang terkait dengan kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Praturan yang bersifat umum yaitu undang undang, sedangkan khusus tertuju pada bidang tertentu seperti kejahatan. Lebih rinci lagi, tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan hukum positif dan hukum islam atas kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang termasuk dalam jenis penelitian doctrinal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dan hasil penelitiannya, yaitu tentang perbedaan hukum atas kasus pemerkosaan, baik melalui hukum positif atau pun hukum islam.

Kata Kunci: Pelecehan, Hukum Positif, Hukum Islam.

ABSTRACT

Indonesia is a country that upholds the law, as stated in the 1945 Constitution, Article 1 paragraph (3). One of the characteristics of a state of law, everything related to the life of society is regulated by law, both general and specific. General regulations are laws, while specific regulations are aimed at certain areas such as crime. In more detail, the purpose of this study is to determine the comparison of positive law and Islamic law on cases of rape of girls. This study applies the normative legal research method, which is included in the type of doctrinal research. The approaches used include conceptual approaches and legislative approaches. And the results of the study, namely about the differences in law on rape cases, both through positive law and Islamic law.

Keywords: Harassment, Positive Law, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Salah satu ciri Negara hukum, semua yang terkait dengan kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dalam kehidupan masyarakat modern peraturan yang bersifat umum dituangkan dalam bentuk undang-undang. Setiap Undang-undang mengatur di bidang tertentu, salah satunya tentang kejahatan, karena kejahatan muncul di mana saja dan kapan pun. Bahkan bisa dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun dikarenakan sifatnya yang merugikan, maka wajar bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.¹ Di dalam kehidupan di dunia ini, hampir seluruh aspek kehidupan seseorang tersebut itu diatur oleh aturan terutama hukum. Islam juga mengajarkan sebaliknya, mulai dari hal kecil hingga besar pasti seluruhnya diatur oleh hukum atau aturan. Apabila mengerjakan yang baik akan mendapatkan balasan yang baik pula, dan apabila kita mengerjakan yang buruk maka kita akan mendapatkan balasan seperti apa yang kita lakukan. Alquran dan sunnah rasulullah SAW. adalah pegangan bagi umat islam untuk menjalankan aspek aspek kehidupan saat

¹ Sulila, "ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENCABULAN ANAK (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)."

ini, bertujuan untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi patokan terhadap perintah Allah SWT.

Hukum Islam seperti kita ketahui bersama ialah peraturan yang diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk menata kehidupan manusia di muka bumi. Aturan-aturan tersebut terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Peraturan itu dapat terealisasi dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah memberikan maslahat kepada umat manusia. Pencapaian tujuan utama syariat menjadi sebuah hukum harus dilandasi pada aspek maqāsid al-syari'ah yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Namun dalam kehidupan ini tidak ada satupun manusia yang mampu terlepas dari masalah kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.² Masalah kejahatan adalah problem manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial dan produk dari masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan manusia karena di mana terdapat masyarakat maka disitu terdapat kejahatan. Indonesia merupakan negara yang didirikan atas supremasi hukum dan telah dianut oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan kedudukan hukum kepada masyarakat dalam gerak dan aktivitasnya. Tetapi, seiring perkembangan zaman maka berbagai macam perbuatan yang melanggar hukum semakin bervariasi. Kejahatan yang sering kali ditemukan pada kehidupan masyarakat yakni kejahatan serta pelecehan seksual. Kejahatan tersebut adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan sebagai permasalahan hukum di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia.³

Masalah kejahatan di era sekarang, pasti berkembang dari waktu ke waktu, dan masalah ini akan sangat berpotensi merusak struktur sosial masyarakat. termasuk di dalam negara Indonesia ini. Kejahatan asusila juga selain ia merusak berbagai aspek sosial, kejahatan asusila juga merusak berbagai moral yang ada disekitar wilayah masyarakat di daerah tersebut, termasuk dimana kejahatan ini juga adalah hal hal yang sangat dibenci dalam agama Islam. Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kejahatan diantaranya di dalam Q.S Fussilat/41:34 yang berbunyi :

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Artinya: *Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang sangat setia*

Pengaturan sanksi pidana terhadap pemerkosaan anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dan pada Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit

² Hidayat dan HI, "Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung"; Hamida dan Setiyono, "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

³ Hamida, Auliya, dan Joko Setiyono. "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (31 Januari 2022): 73–88.

Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Berdasarkan *lex specialis derogate lex generalis*, Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81, mengesampingkan Pasal 287 KUHP. Pasal 81 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tersebut berisi perlindungan hukum kepada anak korban perkosaan. Pada Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang No.23 tahun 2002, telah digunakan batas minimal hukuman penjara yakni 3 (tiga) tahun kepada pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur. Jika dibandingkan dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2002 ini sudah dinyatakan lebih baik dan lebih memperhatikan kepentingan perlindungan korban, khususnya anak yang menjadi korban perkosaan. Pada Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tersebut apabila dilihat dari sanksi pidana yang digunakan maka batas maksimal hukuman yakni penjara yakni 15 (lima belas) tahun. Batas maksimal hukuman ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas maksimal hukuman pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang hanya mengancam maksimal hukuman penjara kepada pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur selama 9 (Sembilan) tahun.⁴ Dalam penjelasan Al-Quran, bahwasannya kekerasan seksual tidak disebutkan secara spesifik atas kekerasan seksual seperti pemerkosaan, akan tetapi menjelaskan yaitu zina. Sebagaimana dijelaskan di quran surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: *Dan jangan lah kamu mendekati zina, sesungguhnya (zina)itu adalah perbuatan keji dan munkar”*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang termasuk dalam jenis penelitian doctrinal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi pustaka. Data sekunder tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum baik dalam penjelasan hukum positif maupun hukum Islam yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan juga sumber hukum Islam. Sementara itu, bahan hukum sekunder dan tersier berfungsi sebagai pendukung bahan hukum primer, contohnya adalah hasil penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan dan buku-buku yang relevan. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana terhadap pelecehan Wanita

Pengertian *tidak pidana* dalam KUHP disebut dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering diistilahkan dengan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskannya melalui suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵

Dalam ketentuan hukum pidana yang tertuang pada KUHP secara khusus menyebutkan perempuan sebagai korban diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

⁴ Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.”

⁵ Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020).

besetubuh dengan dia di luar pernikahan, dincam karn melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kemudian diperjelelas lagi pada pembahasan yang tertuang pada Kitab *Undang-Undang Hukum Acara Pidana* yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelaku. Tercantum dalam Pasal 98 ayat 1, "apabila suatu tindakan yang menjadi dasar tuduhan dalam suatu pemeriksaan kasus pidana di pengadilan negeri menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka ketua majelis hakim atas permintaan pihak tersebut dapat memutuskan untuk menggabungkan kasus tuntutan ganti rugi dengan kasus pidana itu. " Pasal 184 membahas mengenai bukti yang diperbolehkan, sedangkan Pasal 183 menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali ia yakin, dengan minimal dua alat bukti yang sah, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah.⁶

Pemeriksaan merupakan suatu tindakan yang tidak patut dengan cara memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual, dengan menjadikan bagian intim seperti vagina, anus, atau mulut korban sebagai sasaran.⁷ Hal ini juga dapat dilakukan dengan penggunaan jari atau benda lainnya. Tindakan ini bisa berupa serangan dengan kekerasan, ancaman, pembatasan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan situasi tertentu. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu fisik dan non-fisik. Lebih lanjut, berdasarkan alasan hukum, pelecehan seksual yang bersifat fisik dapat dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan yang non-fisik. Penulis berpendapat bahwa kekerasan seksual dalam konteks ini bisa merupakan bentuk pemaksaan untuk berhubungan seksual.⁸

Kita bisa mengambil contoh kasus yang menarik perhatian masyarakat adalah Kasus Dian Ansori. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan untuk menghukum pelaku dengan penjara selama 20 tahun serta denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) yang disertai dengan subsider kurungan 3 bulan. Mantan anggota P2TP2A dari Kabupaten Lampung Timur itu juga dikenai hukuman tambahan berupa kebiri kimia selama 1 tahun dan diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp. 7. 700. 000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Pelaku, yang merupakan pendamping N. Dia, telah melakukan pemerkosaan terhadap korban ketika ia dalam proses pemulihan akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh pamannya, dan pelaku juga pernah menawarkan untuk menjual korban. Keputusan ini menjadi langkah baru bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan mengembangkan kasus dugaan tindak pidana perdagangan manusia, sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan.⁹

Jika tindakan pelecehan ini dilakukan melalui media sosial atau internet sebagai sarana, maka hal ini mengacu pada ketentuan Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 yang menyatakan: “Setiap individu yang dengan sengaja dan

⁶ Alhakim Abdurrahman, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 115–22,

⁷ Wardah Nuroniya, “Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan,” *Equalita* 4, no. 2 (2022): 221–34,

⁸ Hartanto Hartanto and Fifink Alviolita Praiseda, “Refleksi Kekerasan Seksual Dan Pemaksaan Seksual Terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 278–96,

⁹ Saptaning Ruju Paminto and Kori Hermawanti, “Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration,” *Jurnal Dialektika Hukum* 5, no. 1 (2023): 78–90.

tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan serta membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur yang melanggar norma kesusilaan. ” Jelas bahwa individu yang terlibat dalam tindakan tercela ini kini bisa diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan. Berdasarkan aturan yang ada, dapat disimpulkan bahwa regulasi yang berhubungan dengan pelecehan seksual non fisik, padahal hanya ada satu, yaitu UU TPKS yang baru-baru ini dikukuhkan, baik dari segi keadilan maupun kepastian hukum.¹⁰

Hukuman pelecehan Wanita dalam Hukum Islam

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* (pembawa kebagahagiaan bagi seluruh alam. Islam sangat menghargai dan menjaga martabat serta kesucian yang dimiliki oleh setiap individu. Mereka yang dengan sengaja merendahkan martabat ini bisa mendapatkan sanksi yang cukup berat. Konsekuensi hukum yang ditetapkan dalam Islam dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang yang tergabung dalam konsep Masail al-Khamsah, yang meliputi lima aspek utama dalam kehidupan manusia: perlindungan agama, jiwa, akal, martabat, dan keturunan, serta keberlangsungan harta. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa tidak membedakan anatara laki-laki maupun Perempuan, karena perbedaan hanya dinilai oleh Allah SWT yaitu pada keimanan.¹¹

Islam juga mengatur hak hamba-hambanya dengan menerapkan hukum Islam yang sudah dijelaskan oleh Allah SWT. Ada beberapa istilah yang menjelaskan tentang hukum Islam seperti *had*, *qhisas* Akibatnya, mereka yang melanggar kehormatan seseorang dalam Islam dapat dikenakan hukuman yang mencakup *qishash* (balasan yang setara), *had* (hukuman yang sudah ditentukan), atau *diyat* (kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban). Hal ini menegaskan betapa pentingnya menjaga martabat dan kehormatan individu dalam konteks hukum Islam, serta menguatkan nilai-nilai etika dan moral dalam masyarakat.¹²

Sebab takutnya sudah jatuh tertimpa tangga, kasihan si perempuan. Agar terhindar dari zina atau pemerkosaan, ada amalan dari Syekh Al-Dairabi, di mana beliau terkenal dengan amalan yang mujarrab. Beliau mengijazahkan sebagaimana dalam redaksi berikut:

فائدة : نقل عن الشيخ الديري أنه يسن أن يقرأ في أذن المولود اليمنى سورة إنا أنزلناه، لأن من فعل به ذلك لم يقدر الله عليه زنا طول عمره. قال هكذا أخذناه عن مشايخنا

Menukil dari Syaikh Ad Dairabiy bahwa sunah untuk dibacakan pada telinga anak, surat Inna Anzalnahu (al-Qadar). Sebab orang yang melakukan ini, Allah tidak akan menakdirkan dia zina sepanjang hidupnya. Al-Dairobi berkata, demikianlah yang kami dapat dari para guru kami. (Ibrahim Al-Bajuri, Juz 2, h. 572).

Jadi, yang dihukum dalam kasus ini hanyalah laki-laki saja, sebagai pihak pemerkosa. Sedang si perempuan, sebagai pihak yang dipaksa, ia tidak dihad. Salah seorang Ulama' Madzhab Maliki menganggapnya sebagai Konsensus para ulama', beliau mengatakan;

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُسْتَكْرَهِ الْمُعْتَصِبِ الْحَدَّ إِنْ شَهِدَتْ الْبَيْتَةَ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ أَوْ أَقْرَبَ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا عُقُوبَةٌ عَلَيْهِ إِذَا صَحَّ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا وَعَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا وَذَلِكَ يُعْلَمُ بِصُرَاخِهَا وَاسْتِعَاثَتِهَا وَصِيَاغِهَا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ دَمِهَا وَنَحْوِهَا مِمَّا يُفْصِحُ بِهِ أَمْرُهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَقَالَتْ اسْتَكْرَهْتُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ وَتَذَكَّرُهُ عِنْدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَوْ كَانَ الْحَمْلُ وَالْإِعْتِرَافُ فِي كِتَابِ الرَّجْمِ – إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُسْتَكْرَهَةَ لَا حَدَّ عَلَيْهَا إِذَا صَحَّ اسْتِكْرَاهُهَا بِمَا ذَكَرْنَا وَشَبَّهَهُ

¹⁰ Labib Musthofa Kemal and Ifadah Pratama Hapsari, “Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat Dari Hukum Positif Di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2437–43.

¹¹ Muhammad Rifqi Afrizal et al., “Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Tafseer* 10, no. 2 (2022): 154–68,

¹² Khozinatul Asrori and Moh Ahmadi, “Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp,” *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 11, no. 1 (2024): 104–21, <https://doi.org/10.521166/darelilmi.v11i1.6323>.

Para ulama telah bersepakat diberlakukannya hadd bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya had atau si pelaku mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi dua hal tersebut (adanya bukti atau pengakuan), maka baginya hukuman (ta'zir, yakni diasingkan).¹³

Pesalah dapat dikenakan satu atau lebih jenis hukuman berikut berdasarkan bukti dan keterangan yang diajukan kepada hakim.

Hudud:

1. Hudud untuk jenayah zina;

Seorang perogol yang terbukti bersalah dengan bukti dan keterangan yang ditetapkan oleh syarak tanpa keraguan dari pihak hakim akan dikenakan hukuman yang sama seperti pelaku zina:

- Jika pesalah adalah ghair muhsan, yaitu mereka yang belum pernah berkahwin: akan dikenakan seratus sebatan dan taghrib, yaitu pembuangan negeri selama setahun.
- Jika pesalah adalah muhsan, yaitu yang sudah atau pernah berkahwin: akan direjam hingga mati. Hukuman ini diterima dengan ijma' ulama tanpa perselisihan. Terdapat perbezaan pandangan mengenai hukuman sebatan bagi penzina muhsan; pendapat majoriti menyatakan bahawa yang diperlukan adalah rejam tanpa sebatan.

2. Hudud untuk jenayah Hirabah;

Dalam kasus ini, terdapat aspek mencederakan atau ancaman terhadap nyawa, harta, dan lain-lain yang dapat menyebabkan pesalah dikenakan hukuman lain, yaitu hukuman Hirabah.¹⁴

KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum. Hukum pada dasarnya dibuat dalam bentuk peraturan dan ditujukan untuk mengatasi berbagai masalah, terutama kejahatan, yang terjadi di seluruh masyarakat. Karena kejahatan bersifat merugikan. Dalam kehidupan modern, sebagian besar aktivitas manusia diatur oleh aturan hukum, dan Islam juga mengajarkan pentingnya menaati hukum, karena menaati hukum akan menghasilkan hasil yang baik, sedangkan tindakan yang buruk akan mendatangkan akibat yang negatif. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia, sejalan dengan tujuan Syariah, yang berupaya memenuhi manfaat bagi manusia baik dalam hal duniawi maupun spiritual. Akan tetapi, tidak seorang pun dapat sepenuhnya lepas dari realitas kejahatan, yang secara universal dikutuk oleh hukum-hukum agama. Kejahatan merupakan masalah sosial yang signifikan dan terus berkembang seiring waktu, dengan tindak pidana seksual menjadi masalah umum dan serius di Indonesia dan di seluruh dunia.

Kejahatan semacam itu tidak hanya merusak struktur sosial tetapi juga merusak nilai-nilai moral dalam masyarakat, dan kejahatan tersebut sangat dibenci dalam Islam. Beberapa ayat Al-Qur'an membahas masalah yang berkaitan dengan kejahatan, misalnya, dalam Surah Fussilat 41:34, yang menekankan untuk menanggapi kesalahan dengan kebaikan untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Untuk masalah seperti kekerasan seksual terhadap anak, hukum Indonesia menetapkan hukuman khusus di Pasal 287 KUHP mendefinisikan hukuman untuk kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur, sementara Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan tindakan yang lebih ketat, yang mencerminkan komitmen untuk melindungi anak-anak secara lebih efektif. Undang-undang

¹³ Ahmad Hidir, "Hukuman Pelecehan Wanita Dalam Hukum Islam," Bincang syari'ah, 2024.

¹⁴ Amalia Yunia Rahmawati, "Perkosaan Menurut Pandangan Islam," no. July (2020): 1–23.

ini menetapkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP, dengan mengutamakan perlindungan anak korban, meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan kekerasan seksual, ia mengutuk tindakan tidak bermoral, termasuk perzinahan, yang disorot dalam Surah Al-Isra 32, yang memperingatkan agar tidak mendekati dosa-dosa besar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Alhakim. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 115–22.
- Amalia Yunia Rahmawati. "Perkosaan Menurut Pandangan Islam," no. July (2020): 1–23.
- Asrori, Khozinatul, and Moh Ahmadi. "Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp." *Dar El-Ilmi : Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 11, no. 1 (2024): 104–21.
- Hartanto, Hartanto, and Fifink Alviolita Praiseda. "Refleksi Kekerasan Seksual Dan Pemaksaan Seksual Terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 278–96. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3280>.
- Hidir, Ahmad. "No Title Hukuman Pelecehan Wanita Dalam Hukum Islam." *Bincang syari'ah*, 2024.
- Kemal, Labib Musthofa, and Ifadah Pratama Hapsari. "Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat Dari Hukum Positif Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2437–43.
- Mahardika, Agus Rai, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 19–
- Nuroniayah, Wardah. "Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan." *Equalita* 4, no. 2 (2022): 221–34. <https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/equalita/article/view/12906>.
- Paminto, Saptaning Ruju, and Kori Hermawanti. "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration." *Jurnal Dialektika Hukum* 5, no. 1 (2023): 78–90.
- Rifqi Afrizal, Muhammad, Ryan Sauqi, Tsani Mubarak Bih, and Tadzkirotul Ulum. "Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tafseer* 10, no. 2 (2022): 154–68.